# KAJIAN RUANG PADA HUNIAN VERTIKAL UNTUK MBR DENGAN PENDEKATAN KEHIDUPAN SOSIAL DAN PROTOKOL KESEHATAN DI JAKARTA

Penulis :
Adityarini Natalisa. S.T., M.T.
Ina Indah Rahmadani, S.T., M.Si.
Iskandar
*Prodi Arsitektur, FTSP Universitas Jayabaya

## ABSTRAKSI

*Perkembangan perkotaan yang semakin pesat, menyebabkan ketersediaann lahan semakin terbatas. Efisiensi lahan mutlak dilakukan, sedangkan kebutuhan akan perumahan semakin besar pula, maka salah satu yang harus dilakukan adalah membangun hunian vertikal. Namun tidak semestinya hunian vertikal ini mengorbankan aspek sosial yang berkaitan dengan sisi humanis dari kehidupan masyarakat, terutama hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang hanya bisa menempati rumah susun dengan ukuran yang terbatas. Pandemi Covid-19 yang dimulai dari awal tahun 2020, juga menjadi aspek khusus yang harus diperhatikan dalam penyediaan rumah susun di perkotaan, khususnya Jakarta. Perencanaan ruang fisik menjadi hal mendasar di dalam mewadahi kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak ini. Sejauh mana ruang di hunian vertikal dapat difungsikan dengan semestinya oleh masyarakat, serta persoalan yang muncul dari pemakaian ruang tersebut, menjadi latarbelakang tulisan ini dibuat. Metodologi deskriptif kualitatif dengan data sekunder, karena situasi pandemi yang belum memungkinkan untuk survey di lapangan. Perlu munculnya gagasan baru yang lebih inovatif dalam desain rumah susun untuk mewujudkan hunian yang lebih humanis dan memberikan rasa nyaman serta aman bagi penghuninya.*

Kata Kunci : Hunian Vertikal, Rumah Susun, MBR

## PENDAHULUAN

Di tengah lahan perkotaan yang semakin terbatas sedangkan kebutuhan akan rumah layak juga terus meningkat, maka pilihan untuk meningkatkan kepadatan penduduk dalam satu wilayah ke dalam bentuk hunian vertikal, baik *high rise* atau pun *low rise*, menjadi satu-satunya cara dalam mengatasi kepadatan hunian sekaligus meningkatkan *supply* perumahan layak terjangkau bagi masyarakat. Mempertimbangkan hal tersebut, Pemerintah Indonesia dalam RPJMN 2020-2024 mendorong upaya peremajaan kota secara inklusif melalui

konsolidasi tanah dalam rangka mewujudkan kota yang inklusif dan layak huni. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan mengembangkan *public housing* berupa Rumah Susun Perkotaan, yang dicanangkan sebagai *major project* Tahun 2020-2024. (Anggita, 2020)

Sistem hunian vertikal lahir di perkotaan ditujukan untuk menjawab persoalan efisiensi lahan, dalam memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang tumbuh pesat. Namun tidak semestinya hunian vertikal ini mengorbankan aspek sosial yang berkaitan dengan humanisme di dalam kebihupan masyarakat.. Persoalan-persoalan keterjangkauan hunian vertikal bagi MBR bukanlah menjadi alasan untuk mengurangi perhatian terhadap aspek humanism didalam proses penyusunan desain hunian vertikal. (Sabaruddin, 2018)

Definisi hunian vertikal menurut Permen PU nomor 05/PRT/M2007, adalah bagian dari gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat memiliki dan digunakan secara terpisah yang berfungsi sebagai tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Berdasarkan kategori peruntukannya hunian vertikal yang ada di Indonesia saat ini adalah apartemen, kondominium, dan rumah susun. Untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dibangun rumah susun, baik rusunawa maupun rusunami.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menghitung setidaknya ada 65.363 warga yang menghuni 31 rumah susun yang tersebar di beberapa wilayah di ibu kota. Pada masa pandemi sekarang ini, para penghuni rumah susun tersebut harus harus menerapkan protokol kesehatan demi mencegah penularan virus corona atau COVID-19. Selain itu mereka juga harus patuh pada Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (Pranandito, 2020)

Penerapan protokol kesehatan di rumah susun tergolong sulit. Kondisi rusun yang padat akan penduduk membuat para penghuni harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah munculnya klaster Covid-19 di lingkungan tersebut. Demikian juga perencanaan ruang servis, ruang publik, dan koridor yang belum mengantisipasi kondisi pandemi seperti sekarang ini.

Permasalahan tersebut yang melatarbelakangi penulisan ini, yaitu mengkaji masalah-masalah yang dirasakan penghuni di rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian dicari solusi berupa konsep pengembangan desain rusun yang lebih tepat dan baik.

# METODOLOGI

Penulisan ini diajukan untuk menganalisis dan mengungkap fenomena yang terjadi di rumah susun, yaitu salah satu bentuk hunian vertikal di perkotaan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dengan dibatasi pada bidang arsitektur, dengan melihat aspek sosial dan pandemi Covid 19.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Karena situasi saat ini masih diberlakukan PSBB di DKI Jakarta, maka data yang digunakan adalah data sekunder. Maka kajian ini masih belum bisa menyentuh akar masalah di kasus ini, karena belum memungkinkan dilaksanakannya survey di lapangan.

# TINJAUAN PUSTAKA

**Penyediaan Perumahan (Hunian Vertikal) di Indonesia**

Rumah merupakan pusat peradaban manusia, di mana sebuah keluarga tumbuh dan berkembang. Rumah bukan sekedar tempat berlindung *(shelter)* akan tetapi tempat di mana sebuah keluarga dapat melakukan kegiatan, serta mengalami perkembangan kehidupan, di tempat yang aman, sehat, nyaman dan mudah, melalui pemenuhan kebutuhan fisik maupun psikologis dari penghuni.

Tiga aspek utama dalam penyediaan perumahan, meliputi aspek *supply*, aspek *demand* dan aspek *need*. Telaah yang terkait dengan aspek *need* dalam penyediaan perumahan, masih sangat kurang. Kebutuhan rumah tidak hanya dibaca pada sisi kuantitas, akan tetapi dari sisi kualitas yang dikenali sebagai bentuk kesadaran akan keberadaan rumah atau ruang *(existence space)* hunian oleh penghuni. (Sabaruddin, 2018)

Penyediaan perumahan dalam bentuk hunian vertikal merupakan konsekuensi dari perubahan sosial-budaya yang dipengaruhi oleh revolusi industri. Terjadi pertama kali di Inggris, pada abad ke-18, prosesnya terus berlangsung di beberapa negara sampai dengan saat ini. Indonesia mulai pada abad ke20, perubahan sosial-budaya dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, mempengaruhi perubahan pendekatan arsitektur hunian, melalui peningkatan kebutuhan tenaga buruh lebih besar, yang mengakibatkan pertumbuhan penduduk perkotaan menjadi lebih cepat. (Sabaruddin, 2018)

Peresmian Penghunian Rusun Perumnas Klender oleh Presiden Soeharto, pada 3 September 1985 di Jakarta Timur, menjadi masa awal keberadaan rumah susun di Indonesia. Periode 1983-1991 merupakan *milestone* pembangunan rusun sederhana guna yang disebut "peremajaan perkotaan" oleh BUMN Perumnas. Pasca Orde Baru, Kementerian Perumahan Rakyat dihilangkan, berdampak pada kelangsungan program rusun oleh pemerintah.

Hingga akhirnya Kementerian Negara Perumahan Rakyat dibentuk kembali pada 2004, dan selanjutnya dikeluarkan Keputusan Presiden 22/2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan. Upaya konkret pemerintah ialah peresmian program 1.000 Tower rumah susun pada 5 April 2007, untuk memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang layak, sehat, dan terjangkau.. Rusun pertama yang dibangun berbentuk Rumah Susun Sederhana Milik (rusunami) yang berlokasi di Pulo Gebang, Jakarta Timur. Percepatan Pembangunan Rumah Susun dan Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Percepatan Pembangunan Rusun, tertanggal 25 Oktober 2007.

Pemerintah terus berbenah, hingga pada tahun 2011 diterbitkan undang-undang yang krusial bagi persoalan hunian di Indonesia termasuk rusun, yaitu UU 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan UU 20/2011 tentang Rumah Susun, sebagai revisi UU 16/1985 tentang rusun. UU ini mengatur tentang rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial yang dikembangkan swasta atau biasa disebut apartemen. (Widhana,2020)

Luas unit hunian yang termasuk Tipe Rumah Susun Sederhana (Rusuna) ada 3 (tiga) tipe yaitu tipe 18m , 21m , dan 36m. Adapun yang termasuk Rumah Susun Sederhana adalah Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami). Rusunawa diperuntukan bagi masyarakat menengah ke bawah di daerah perkotaan maupun metropolitan, dan rancangannya harus mencakup kebutuhan tipe rumah berukuran 18 m2, 21 m2, 25 m2, dan 36 m2 yang tidak menggunakan sarana lift atau *walk-up flat* (Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, 2002).

**Penelusuran Masalah di Rumah Susun**

Fakta perumahan perkotaan saat ini, menunjukkan kondisinya masih jauh dari ideal. Kondisi luas ruang masih di bawah standar yang diijinkan. Secara fisik, kondisi bahan bangunan yang digunakan belum memenuhi ketentuan minimal. Kondisi tersebut bertentangan dengan tata nilai hunian sebagai pusat peradaban, sehingga sulit untuk membangun sebuah bangsa yang memiliki daya saing yang tangguh dalam

menghadapi globalisasi. Penyediaan perumahan merupakan tantangan arsitektur hunian di masa mendatang.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam *Indonesia Property Expo* 2018 merumuskan 10 masalah yang dihadapi keluarga urban di rumah susun, yaitu :

Pertama, rumah susun tidak ramah anak, yaitu ketidaktersediaan fasilitas dan ruang publik untuk anak secara memadai;

Kedua, masalah keamanan, dikarenakan manajemen lingkungan yang buruk dan masih banyak isu kriminal yang beredar pada hunian vertikal;

Ketiga, masalah sampah yang dipicu oleh masih kurangnya kesadaran pengguna terhadap kebersihan lingkungan komunal;

Keempat, demografi penghuni di suatu hunian vertikal sering terdiri dari kelompok sosial yang seragam dari segi umur dan penghasilan;

Kelima, masalah konsep vertikal yang dianggap baru, yaitu akan muncul perubahan dari cara hidup masyarakat yang tadinya horizontal ke cara hidup vertikal, serta beralihnya kolektivitas ke individualism;

Keenam, stigma buruk terhadap penggusuran, dari warga permukiman setempat ke pengembang maupun pemerintah yang hendak memperbaiki kondisi hunian;

Ketujuh, konsumsi energi tinggi, terutama penggunaan listrik dan air berlebihan;

Kedelapan, akses ke dan dari transportasi umum yang tidak terjangkau untuk menunjang aktivitas keseharian;

Kesembilan, kebanyakan permukiman vertikal yang ada sekarang bersifat mono-programtik, tidak ada fasilitas untuk aktivitas ekonomi mikro pendukung;

Kesepuluh, keterbatasan unit dan harga yang tidak terjangkau bagi kelompok yang membutuhkan.

Masalah lain di rumah susun yang terkait dengan bangunan, antara lain bentuk bangunan yang monoton dan jarak antar bangunan serta koridor penghubungnya; cahaya alami dan sirkulasi udara di dalam ruang kurang memadai; ukuran unit kecil, tidak fleksibel, dan sempit dengan ruang gerak yang minim; koridor sempit dan panjang karena perencanaan denah ruang yang kurang optimal, dan meminimalisasi luas sirkulasi untuk memperbanyak unit; kurangnya interaksi sosial antar tetangga karena minimnya tempat komunal yang tersedia; tidak ada fasilitas kesehatan terdekat; jauh dari fasilitas pendidikan; ruang terbuka hijau dan ruang publik. (Lawi, 2018)

Salah satu prasarana yang paling penting di rusun adalah ruang publik, karena ruang publik adalah sarana interaksi dan komunikasi penghuni rusunawa. Tetapi saat ini banyak ruang publik yang fungsinya disalahgunakan. Muncullah masalah penyalahgunaan ruang publik, yang seharusnya berfungsi sebagai tempat untuk melakukan kegiatan sosial dijadikan tempat untuk melakukan aktivitas pribadi sehingga area ruang publik menjadi berkurang, hal ini dapat menimbulkan konflik antara sesama penghuni. Privatisasi ruang publik juga terjadi di lapangan olahraga yang digunakan sebagai area parkir kendaraan roda empat, dengan alasan karena keterbatasan lahan parkir pada bangunan tersebut.

Berikut beberapa contoh kasus dari pelanggaran pemanfaatan ruang bukan hunian pada rusunawa dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1. Penghuni menjemur pakaian di void Rusunawa Muara Baru, Jakarta
Sumber : https://simantu.pu.go.id

Secara umum, persoalan yang muncul disebabkan oleh kebiasaan yang tidak bisa diubah dengan seting tempat barunya. Sering kali, hunian barunya tidak mengakomodasi kebiasaan tersebut, sehingga penghuni cenderung mengubah seting atau memanfaatkan ruang yang ada untuk keinginannya. Pada gambar 1 di atas menunjukkan fungsi void digunakan sebagai area jemur pakaian.

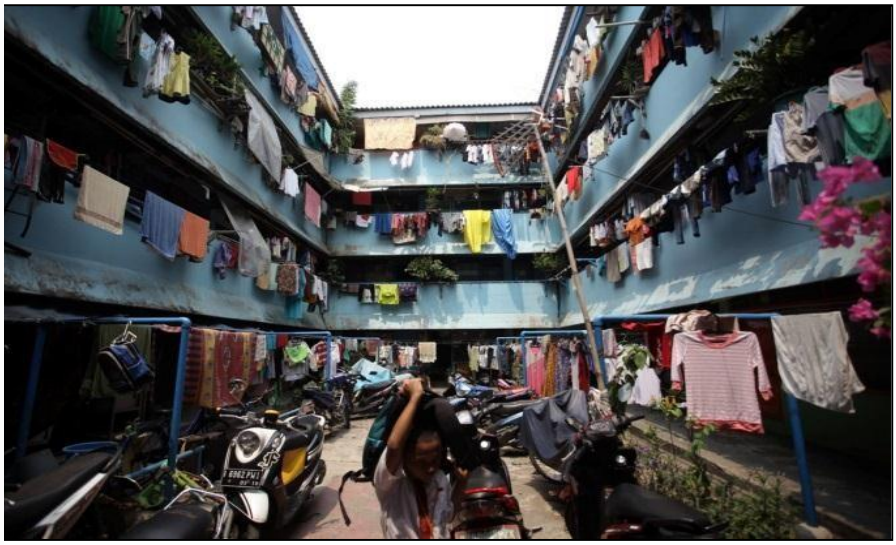

Gambar 2. Halaman tengah Rusunawa Karang Anyar Jakarta
yang dipenuhi dengan jemuran yang bergelantungan dan motor
Sumber : https://simantu.pu.go.id

Demikian juga di gambar 2, halaman tengah yang fungsinya untuk penghawaan dan pencahayaan, digunakan sebagai area jemur dan parkir motor. Akhirnya lingkungan menjadi kumuh dan tidak sehat, terutama di masa pandemi covid seperti saat ini.

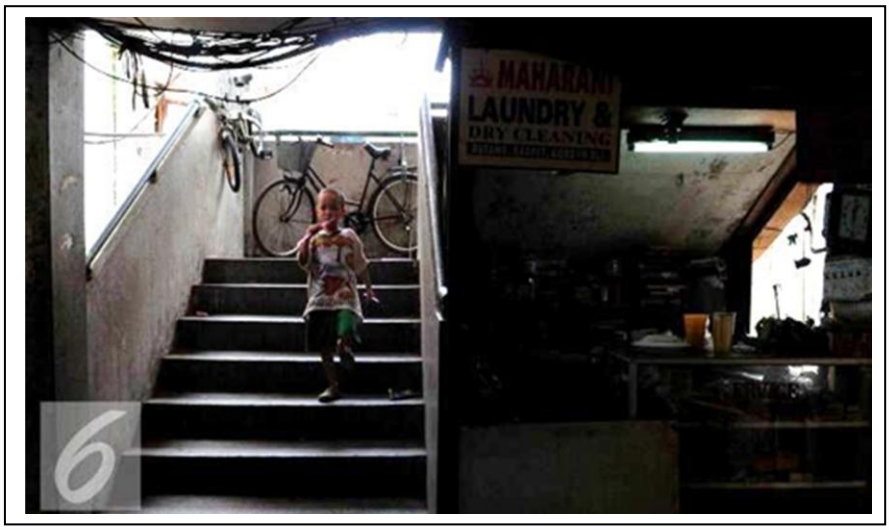


Gambar 3. Ruang bawah tangga yang digunakan untuk usaha *Laundry*
di Rusunawa Karang Anyar, Jakarta
Sumber : https://simantu.pu.go.id

Ruang-ruang kosong akan cenderung digunakan oleh penghuni untuk keperluan pribadinya, baik untuk usaha atau menaruh barang pribadi. Jika ini tidak diatur, maka akan terjadi konflik antar penghuni.

Gambar 4. Koridor yang dipakai sebagai ruang tamu oleh penghuni
di Rusunawa Gunung Sari, Surabaya
Sumber : https://simantu.pu.go.id

Koridor depan unit digunakan sebagai ruang komunal, tempat penghuni bersosialisasi dengan tetangga. Karena areanya sempit dan tertutup, maka mereka cenderung tidak menjaga jarak, sehingga resiko terpapar virus sangat besar. Apalagi untuk masuk ke bangunan tidak ada *screening* suhu badan dan penerapan protokol kesehatan.

Berbagai masalah yang muncul di rumah susun terkait dengan ruang dan bangunan ini mengakibatkan persepsi masyarakat terhadap rumah susun menjadi tidak baik. Rumah susun untuk MBR khususnya, dikenal sebagai kawasan yang kumuh, tidak terawat, jorok, serta beralihnya fungsi ruang yang mengakibatkan kinerja bangunan menjadi tidak optimal.

## PEMBAHASAN

Kementerian PUPR telah menetapkan bahwa perancangan rumah susun menggunakan Multi Modul, yaitu merancang bangunan rumah susun menggunakan dasar ukuran modul terpilih. tentang Ukuran terpilih untuk bangunan rumah dan gedung, Penentuan modul ini ada di SNI 03-1978-1990, bahwa modul terpilih adalah

ukuran modular yang merupakan kelipatan bilangan bulat dari Multi Modul baik arah horisontal maupun arah vertikal.(Hartinisari, 2018) Pertimbangan rancangannya adalah :

a) Pada luas sarusun yang terbatas, hanya aktivitas pokok yang dapat diwadahi;
b) Dalam ruang Sarusun tidak punya peluang untuk melakukan perubahan/transformasi, maupun ekspansi ruang baik kearah vertikal maupun horizontal;
c) Besaran ruang perlu diperhitungkan terhadap *furniture* inti pendukung aktifitas pokok.

Untuk keluarga yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang termasuk aktivitas pokok adalah tidur, keluarga, terima tamu, makan, masak, simpan, cuci, mandi, BAB/K, jemur, setrika. Sedangkan ruang yang dibutuhkan adalah tidur, multifungsi, dapur,simpan, jemur, setrika,MCK.

**Penentuan** Modul Dasar Ruang Sarusun terkecil**nya dengan m**enggunakan kelipatan Multi Modul Dasar terkecil (90 cm)**, dan mendekati k**ebutuhan luas ruang 9 m²/jiwa **(SNI 03-1733-2004 tentang Tata C**ara **Perencanaan Lingkungan Perumahan di P**erkotaan)**.**

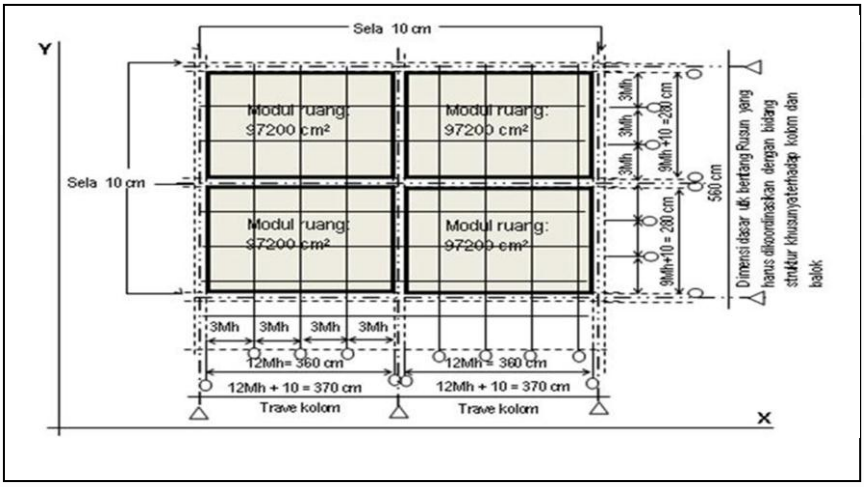


Gambar 5. Modul Ruang Sarusun untuk 4 Jiwa
Sumber : https://simantu.pu.go.id

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adisurya, 2016, terhadap rusun di Tanah Abang, Tebet, dan Tanah Abang, disimpulkan bahwa kegiatan penghuni berdampak pada besaran unit hunian. Pada rusun ini ruangan yang paling banyak aktifitas penghuninya adalah ruang bersama atau ruang keluarga. Dalam perkembangan pembangunan Rusun di tiap unit hunian di temukan ruang bersama atau ruang

keluarga adalah ruang yang paling besar ukurannya dibanding ruang lain. Ukuran unit hunian yang ada sekarang ini, belum mencukupi luas kebutuhan satu keluarga sangat sederhana karena luasnya kurang dari 36m . Bila 36m unit hunian bisa berukuran 6m x 6m pengembang dapat membagi luas unit hunian menjadi 6 ruang yang dibutuhkan.

Berikut adalah analisa dari permasalahan hunian vertikal (rumah susun) yang telah diuraikan di atas :

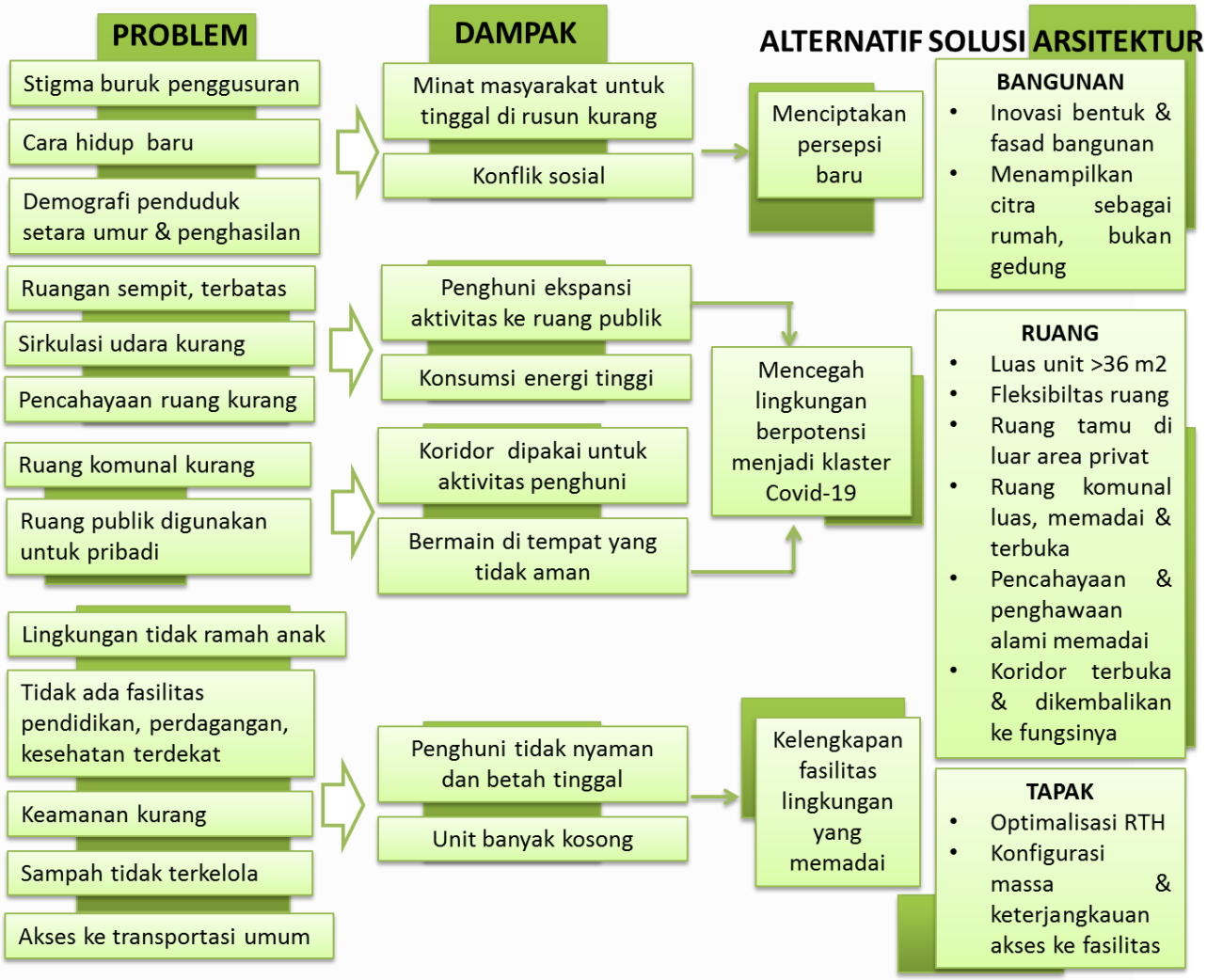


Skema 1. Analisa

Sumber : Penulis, 2021

Secara arsitektural, kajian terhadap hunian vertikal dapat dibagi atas aspek bangunan, ruang, dan tapak/lingkungan. Bentuk dan wajah/fasad bangunan merupakan aspek penting dalam menciptakan persepsi masyarakat terhadap fungsi yang diwadahi oleh bangunan tersebut. Kekakuan bentuk rumah susun, penggunaan warna yang

suram, serta bentuk standar yang sudah dikenal masyarakat, akan membuat persepsi jika bangunan tersebut tidak ada beda dengan bangunan lain yang sudah mempunyai *image* tertentu.

Bagaimana bangunan rumah susun bisa membuat masyarakat tertarik, konsepnya adalah menciptakan bentuk dan fasad baru yang berbeda dari bangunan-bangunan sejenis yang lain, yang dapat menumbuhkan kebanggaan dan aktualisasi penghuninya. Menampilkan citra bangunan sebagai "rumah" dan citra rusun sebagai "kampung vertikal" juga akan membuat calon penghuni nyaman seperti di rumah/kampung sendiri.

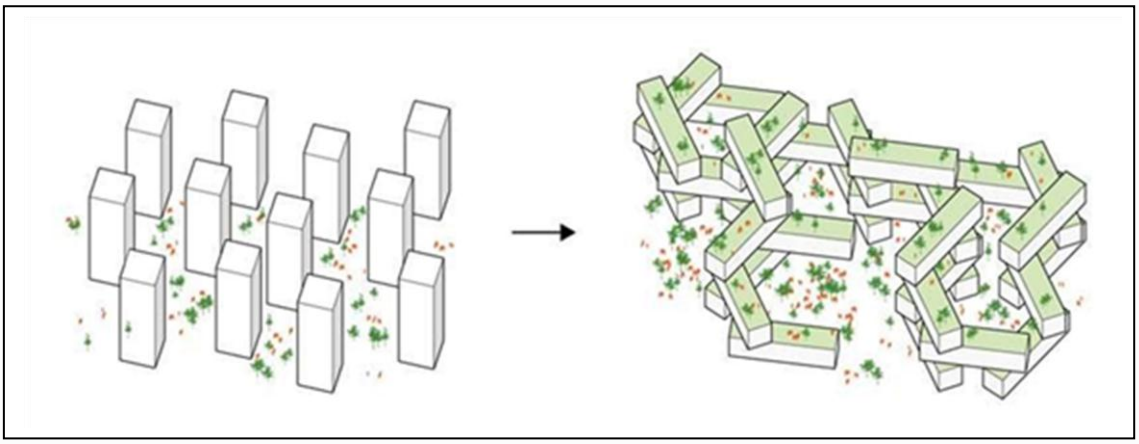

Gambar 6. Contoh Konfigurasi Massa Hunian Vertikal
Sumber : Iskandar, 2021

Gambar 7. Penjaringan, Jakarta Kampung Vertikal oleh Arsitek Yu Sing
Sumber : http://rumah-yusing.blogspot.com/2013/07/rusun-penjaringan-jakarta-vertical.html

Kepadatan dan tata letak bangunan, jarak antar bangunan ditentukan oleh udara yang harus bisa lewat dan pencahayaan alami yang harus dapat diterima, kedudukan bangunan satu dengan yang lainnya diatur sedemikian rupa sehingga sedikit mungkin privasi terganggu oleh pandangan dari balik jendela tetangga.

Kajian ruang terhadap hunian vertikal, dalam hal ini adalah rumah susun untuk MBR, dapat dibagi menjadi area privat dan area publik. Area privat adalah unit-unit huniannya, sedangkan area publik meliputi ruang komunal, ruang bermain, fasilitas sosial, dan fasilitas umum.

- Area Privat (Unit Hunian)
  - Ukuran unit hunian di bawah 36 m2 sudah tidak nyaman untuk 4 keluarga.
  - Denah ruang serta akses pencahayaan, penghawaan, sirkulasi, dan fleksibilitas ruang.
  - Ruang cuci & jemur di tipe ini tidak ada, sehingga penghuni menggunakan *railing* balkon untuk menjemur (ekspansi ke area publik)

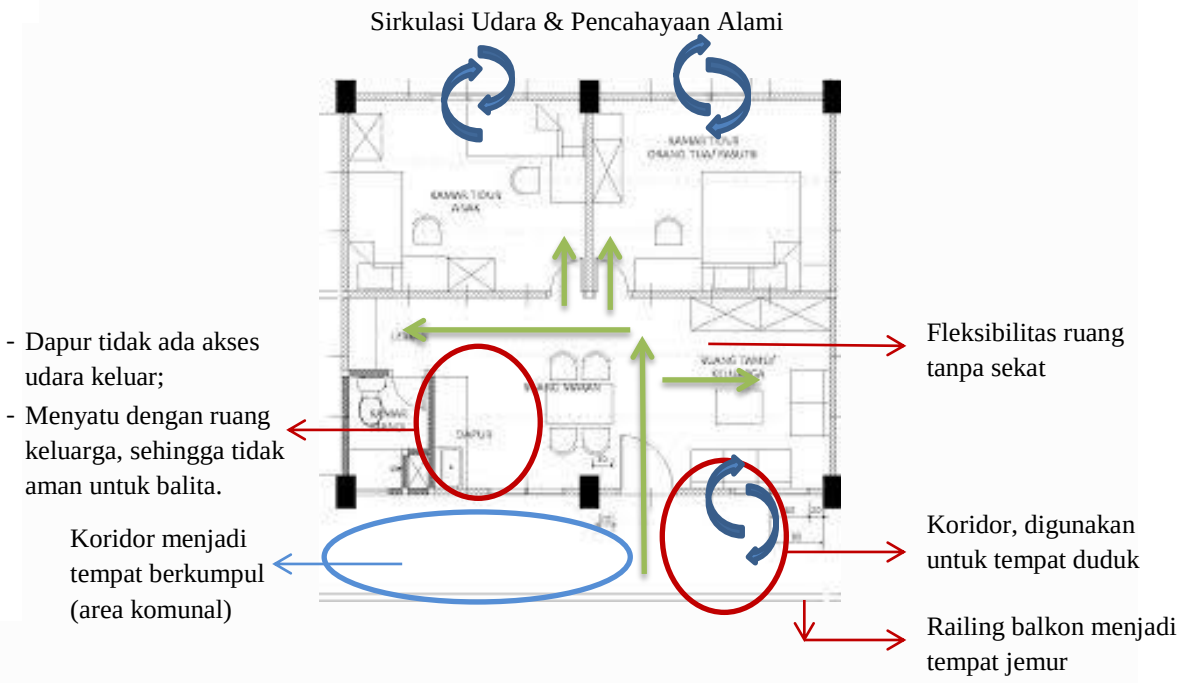


Gambar 8. Analisa Ruang Unit Hunian Rusun
Sumber : Penulis, 2021

- Area Publik (Ruang Komunal & Ruang Sirkulasi)
  - Ruang sirkulasi (koridor) sering dipakai oleh penghuni untuk tempat bersosialisasi dengan tetangga. Ini menjadikan ketidaknyamanan penghuni lain,

dan mengganggu sirkulasi,karena diletakkan kursi-kursi. Untuk itu perlu dibuat ruang komunal, tempat bersosialisasi penghuni di tiap lantai, terbuka agar mendapat penghawaan alami, dan memenuhi protocol kesehatan.

- Kegiatan cuci dan jemur di ruang komunal juga tidak tepat, maka harus disediakan tempat untuk cuci jemur yang memadai di tiap unit atau tiap lantai. Bagi masyarakat, kegiatan cuci jemur ini sekaligus sebagai ajang untuk bersosialisasi dengan tetangga. Ini merupakan kebiasaan di kampung, yang mana kegiatan mencuci dilakukan di area publik, yaitu sungai atau sumur.
- Ruang komunal juga memanfaatkan RTH sebagai ruang aktif, baik untuk bermain, berolahraga, dan berkebun. Untuk kegiatan anak-anak, lebih aman di ruang hijau terbuka dalam bangunan *(inner court),*karena lebih mudah diawasi dari unit huniannya dan orang asing tidak mudah masuk.

Gambar 9. RTH dan arena bermain anak di Rusun Pulogebang Indah
Sumber : https://www.dekoruma.com/artikel/71648/fakta-menarik-rumah-susun

- Fasilitas Lingkungan
  - Prasarana lingkungan, perlu dirancang jalan setapak dan jalan kendaraan yang tidak saling melintasi.
  - Fasilitas lingkungan, hal ini menyangkut penataan kota dalam skala lebih besar sebagai total sistem dengan kelompok hunian vertikal yang menyatukan sebuah pusat lingkungan dengan semua fasilitas yang dibutuhkan sebagai sub sistemnya.
  - Pandemi Covid 19 yang mengharuskan pasien positif OTG melakukan isolasi mandiri, menjadi fenomena baru dalam perencanaan ruang di hunian vertikal. Dengan

penghuni lebih dari 500 orang dan unit hunian sangat rapat, maka fasilitas rawat khusus untuk pasien isolasi mandiri harus disediakan, dilengkapi dengan klinik atau posko kesehatan.

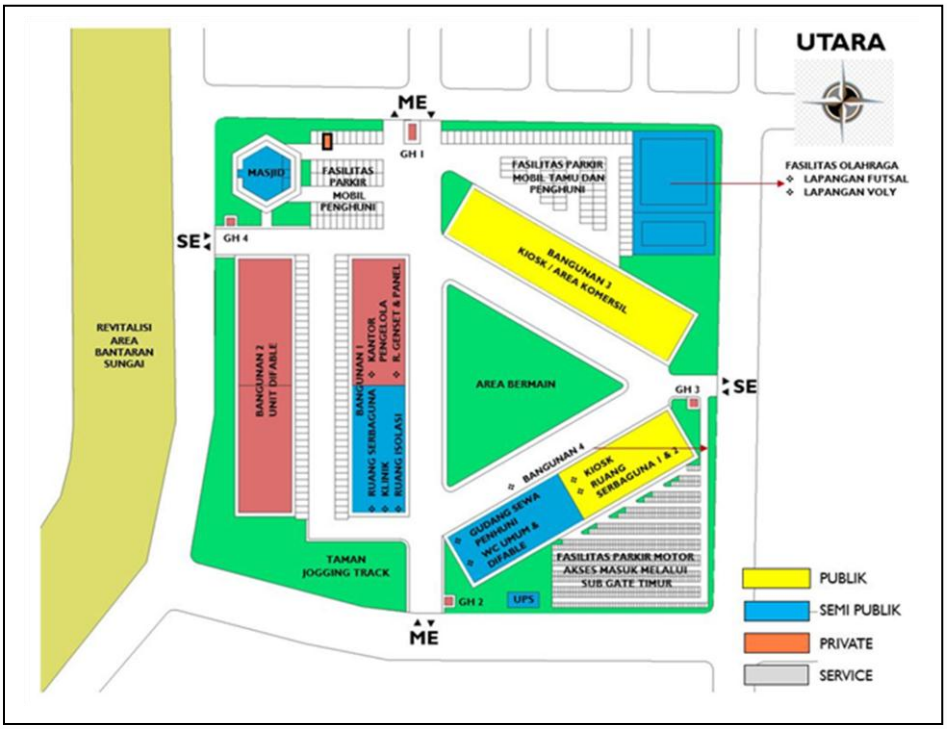


Gambar 8. Contoh Perencanaan Tapak & Fasilitas Rusun
Sumber : Iskandar, 2021

## KESIMPULAN

Kajian ruang pada hunian vertikal tidak lepas dari aspek sosial, budaya, dan psikologi lingkungan. Pemanfaatan ruang (pasca huni) mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama di ruang publik, antara lain adanya ekspansi kegiatan privat ke area publik. Ini merupakan problem yang hampir di semua rusun di Jakarta ditemui. Akar masalahnya adalah ruang yang tersedia belum memenuhi kebutuhan penghuninya, sehingga penghuni memanfaatkan ruang-ruang lain untuk mewadahi kepentingannya tersebut.

Untuk itu perlu inovasi di dalam perencanaan dan perancangan rumah susun, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ide Kampung Vertikal oleh Arsitek Yu Sing merupakan gebrakan baru di dalam desain rumah susun yang selama ini menganut langgam Fungsionalisme, menjadi ke Post-Modern dengan mengangkat kearifan lokal.

# DAFTAR PUSTAKA


- Adisurya, Susy Irma, 2016, *KAJIAN BESARAN RUANG PADA UNIT RUMAH SUSUN DI JAKARTA, Studi Kasus: Rusun Tebet, Rusun Tanah Abang dan Rusunami Kalibata*, Dimensi, Vol.1- No.1, September 2016, diunduh dari https://core.ac.uk/download/pdf/267899446.pdf

- Anggita, Tiara, 2020, *Public Housing Rumah Susun Perkotaan Solusi Hidup Terjangkau Di Tengah Kota Bagi Masyarakat Indonesia Di Masa Depan*, Jakarta, diunduh dari http://nawasis.org/portal/berita/read/public-housing-rumah-susun-perkotaan-solusi-hidup-terjangkau-di-tengah-kota-bagi-masyarakat-indonesia-di-masa-depan/51949

- Iskandar, 2021, *KAJIAN KONSEPTUAL PERENCANAAN DAN PERANCANGAN*
- *RUMAH SUSUN PIK PULOGADUNG SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN PADAT DI JAKARTA TIMUR*, Seminar Arsitektur, Universitas Jayabaya, Jakarta.

- Khatarina Lawi, 2018, *Ini Dia 10 Masalah Keluarga Urban di Rusun*, Jakarta, diunduh dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20181002/49/844640/ini-10-masalah-rumah-susun-versi-pemerintah-apa-saja

- Sabaruddin, Arief, 2018, *HAKEKAT HUNIAN VERTIKAL DI PERKOTAAN*, Kementerian PUPR, diunduh dari https://www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/lslivas/article/download/2738/2364

- Widhana, Diegy Hasbi, *Persoalan Rusun dari Masa ke Masa*, diunduh dari https://tirto.id/persoalan-rusun-dari-masa-ke-masa-cfDL

- https://simantu.pu.go.id
- http://rumah-yusing.blogspot.com/2013/07/rusun-penjaringan-jakarta-vertical.html

- https://www.idntimes.com/news/indonesia/gregorius-pranandito/virus-corona-warga-rumah-susun-protokoler-psbb
- https://republika.co.id/berita/qk1i0s314/suasana-penerapan-protokol-kesehatan-di-rusun
- https://www.dekoruma.com/artikel/71648/fakta-menarik-rumah-susun